

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan pelayanan publik di Indonesia sudah menjadi tugas utama pemerintah yang harus di optimalkan. hal ini dapat di wujudkan dengan menyusun rencana keuangan dalam bentuk anggaran yang tepat sasaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang di jadikan dasar dalam pedoman pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelayanan public. Di Indonesia dokumen anggaran daerah sering di sebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah berdasarkan desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Baldric Siregar (2015:29) Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun sumber-sumber pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Rahmawati, 2010: 1). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disamping pendapatan asli daerah, dalam menjalankan asas desentralisasi pemerintah daerah juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat yakni berupa transfer berupa dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Abdul Halim). Selanjutnya Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam

APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Sumatera Selatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah terbesar, hal ini menandakan bahwa provinsi Sumatera Selatan masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam mengeluarkan dana untuk melakukan belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan**

| Tahun anggaran | PAD (Rp)  | DBH (Rp)  | DAU (Rp)  | Belanja Langsung (Rp) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2014           | 2.482.129 | 2.793.113 | 985.543   | 2.228.143             |
| 2015           | 2.784.967 | 2.207.759 | 985.543   | 3.035.964             |
| 2016           | 2.733.330 | 1.483.327 | 1.071.421 | 2.229.365             |

*Sumber: www.djpk.go.id*

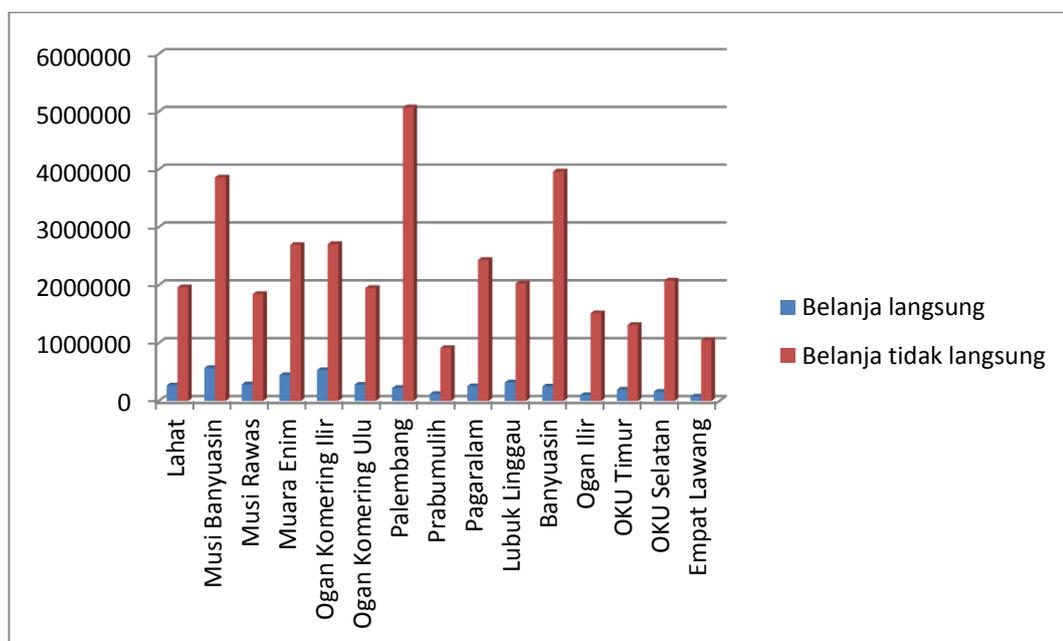
Pada tabel di atas di peroleh bahwa pada tahun 2015 dana perimbangan tidak lagi menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Wakil gubernur provinsi Sumatera Selatan Ishak Mekki mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena telah terjadinya pengurangan target perimbangan dan penundaan transfer dana perimbangan akibatnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 tidak dapat mencapai target. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian untuk dapat menutupi belanja yang telah direncanakan pada anggaran 2015. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu focus dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan kemandirian pendapatan dapat mengurangi ketergantungan kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sangat penting dilakukan karena mengingat program dan kegiatan yang sudah di rencanakan tetap harus dilaksanakan demi terwujudnya pembangunan daerah khususnya pembangunan sarana, prasarana, dan infastruktur yang tertuang dalam

belanja modal dimana belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung. Menurut Darise (2009: 136) Belanja Langsung adalah yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari; (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, (c) Belanja Modal.

Dapat di ketahui grafik mengenai belanja langsung dan belanja tidak langsung di provinsi sumatera selatan.

**Grafik 1.1**  
**Belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2014-2016**



Sumber: [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Data di atas menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan belanja daerah masih kecil dalam mengeluarkan dana belanja langsung dari pada belanja tidak langsung, Pada tahun 2015 belanja langsung pemerintah sumatera selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Belanja langsung sebaiknya lebih besar di bandingkan belanja tidak langsung karena belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung di pengaruhi secara langsung dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2010 agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu agar belanja langsung mendapatkan porsi alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung.

Karakteristik pada belanja tidak langsung merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama dalam melaksanakan program atau kegiatan unit kerja sedangkan belanja langsung adalah alokasi belanja (input) yang ditetapkan dapat di nilai dan dibandingkan dengan output yang dihasilkan.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah diharapkan juga meningkatnya alokasi belanja langsung. Ini dikarenakan belanja langsung memiliki keterkaitan langsung dengan program. Belanja langsung digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan program yang dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja langsung diharapkan memiliki proporsi lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung, dikarenakan belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah.

Oleh karena itu dengan adanya sumber pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, dana alokasi umum diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengalokasian anggaran belanja langsung. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Try Indraningrum (2011) penelitian variabel dependen adalah Belanja Langsung dan variabel independen adalah Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pengaruh positif dari signifikan terhadap Belanja Langsung. selanjutnya yang dilakukan oleh Yeyen Rizkiyuni Husein (2014) variabel dependen adalah Belanja Langsung dan variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung, dana

alokasi umum berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Langsung dan dana alokasi khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Langsung Pemda Kabupaten Gorontalo Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan masalah**

berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung?
2. Apakah Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung?
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mempublikasikan data anggaran menggunakan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
3. Batasan waktu dalam penelitian yaitu hanya tahun 2014-2016

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Langsung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Langsung.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Langsung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Langsung.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja langsung, sehingga informasi ini dapat digunakan oleh pihak berkepentingan seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat umum dan peneliti selanjutnya.
2. Selain faktor mana yang paling berpengaruh secara parsial, penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi terhadap belanja langsung sehingga informasi ini dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini dalam rangka belanja langsung.